



SILANG PENDAPAT ANTARMENTERI KABINET KERJA

Aryojati Ardipandanto*)

Abstrak

Pada pemerintahan Presiden Jokowi, beberapa silang pendapat antarmenteri telah terjadi. Beberapa diantaranya adalah silang pendapat terkait program pembangkit listrik, rencana pembelian pesawat untuk Garuda Indonesia, pembangunan kilang gas Blok Masela, persoalan kapal sapi, impor ikan, impor sapi, dan masalah harga pangan, yang mana hal-hal tersebut melibatkan perbedaan pandangan antara beberapa Menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas. Banyak pihak berharap Presiden Jokowi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga kinerja Kabinet untuk melayani kepentingan rakyat tidak terganggu. Beberapa usulan penanganan masalah ini adalah pertama pembuatan code of conduct bagi para Menteri dalam melaksanakan kinerjanya, serta meningkatkan fungsi kepemimpinan Presiden dalam mengedepankan prinsip team working bagi kabinet.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, kinerja Kabinet Kerja dalam pemerintahan Presiden Jokowi diuji sinergitasnya. Beberapa silang pendapat antarmenteri terjadi terutama terkait masalah program pembangkit listrik, rencana pembelian pesawat Garuda Indonesia, pembangunan kilang gas Blok Masela, masalah kapal sapi, persoalan impor ikan dan sapi, serta masalah kemahalan harga pangan yang mana hal-hal tersebut melibatkan perbedaan pandangan kebijakan politik antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas.

Contoh yang terjadi, dalam masalah rencana pembangunan kilang gas Blok Masela di lepas pantai yang diusulkan Menteri ESDM, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya menolaknya dengan alasan penerapan teknologinya masih bersifat uji coba, sehingga akan mengalami pembengkakan biaya dan dinilai sebagai suatu pemborosan. Dalam masalah impor ikan, kebijakan impor ikan teri yang dimudahkan melalui regulasi Menteri Perdagangan sangat disesalkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu. Kebijakan impor ikan itu dinilai akan membahayakan program ekonomi kreatif masyarakat. Dalam masalah

*) Peneliti Pertama Ilmu Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: aryojati.ardipandanto@gmail.com.



kapal sapi, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian saling menyalahkan terkait tidak optimalnya pengangkutan ternak pada kapal yang telah difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan. Pada masalah impor sapi, disesalkan tidak adanya koordinasi antara Menteri Keuangan dengan Menteri Perdagangan, terutama terkait dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan PPN sebesar 10% pada sapi yang diimpor.

Terkait melonjaknya harga bahan pangan, terjadi silang pendapat antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian, terutama terkait pandangan bahwa persoalan harga pangan yang melambung adalah persoalan tata niaga, bukan pada masalah produksi pertanian. Terkait masalah pembangunan listrik, Menteri ESDM Sudirman Said diminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk mengevaluasi program pembangunan listrik 35.000 megawatt. Menurut Rizal Ramli, target pembangunan listrik yang dicanangkan Presiden Jokowi terlalu ambisius, apalagi ditambah masih ada program pembangunan 7.000 MW dari era SBY.

Beberapa contoh di atas disayangkan banyak kalangan terutama karena dibawanya silang pendapat antarmenteri tersebut ke ranah publik. Dengan demikian, publik menjadi khawatir apabila silang pendapat antarmenteri itu akan mengganggu jalannya proses pemerintahan. Hal yang perlu segera dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah bagaimana meredam silang pendapat para menteri tersebut dan menyelesaikannya secepat mungkin.

Manajemen Pemerintahan

Dalam mengatasi masalah silang pendapat antarmenteri tersebut, yang diperlukan adalah efektifitas manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan yang efektif adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan secara efektif dan tepat sasaran. Manajemen pemerintahan yang efektif ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan.

Manajemen pemerintahan yang baik dan efektif menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional. Nilai-nilai yang perlu diperhatikan antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu,

diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Konsentrasi kekuasaan ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan politik yang kuat dan efektif dari presiden untuk mengatur dan mengarahkan para menterinya agar mampu bersinergi atau bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan nasional.

Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan kepemimpinan diantaranya menurut Dr. Thomas Gordon "*Group Centered Leadership*" bahwa:

"Kepemimpinan dapat dikonsepsualisasikan sebagai suatu interaksi antara seseorang dengan suatu kelompok, tepatnya antara seorang dengan anggota-anggota kelompok setiap peserta di dalam interaksi memainkan peranan dan dengan cara-cara tertentu peranan itu harus dipilah-pisahkan dari suatu dengan yang lain. Dasar pemilihan merupakan soal pengaruh, pemimpin mempengaruhi, dan orang lain dipengaruhi."

Menurut Terry Hoyt 'kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok'. Pendapat para ahli lainnya menurut James, mengemukakan berkaitan dengan teori kepemimpinan tersebut yaitu 'kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dibawah kepemimpinannya sebagai satu tim untuk mencapai tujuan tertentu'.

Dalam konteks kepresidenan, hal yang lebih spesifik dari kepemimpinan adalah konsep kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional adalah kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional di dalam setiap gatra pada bidang/sector profesi baik di suprastruktur, infrastruktur dan substruktur, formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/mengerahkan kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta memerhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis

guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang. Karakter yang dibutuhkan dalam kepemimpinan nasional adalah perilaku dan sifat-sifat antara lain memiliki kemampuan berkomunikasi, semangat *team work*, kreatif, percaya diri, inovatif, dan mobilitas.

Sikap Presiden Jokowi dan Penyelesaian Masalah Silang Pendapat Antarmenteri

Presiden Jokowi cukup prihatin terhadap beberapa peristiwa yang melibatkan beberapa menteri saling 'menyerang' di ranah publik. Presiden Jokowi menegaskan untuk menghentikan situasi ini. Presiden meminta perdebatan para menterinya hanya diperbolehkan dalam rapat terbatas atau rapat kabinet saja. Hal ini sudah pernah disampaikan oleh presiden dengan bahasa 'jangan gaduh di luar'. Presiden marah dengan silang pendapat antarmenteri yang terlihat semakin meruncing, bahkan sudah mengarah pada pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh presiden, agar semuanya dihentikan. Ke depan, siapa pun menterinya harus sadar untuk memposisikan diri bahwa menteri itu adalah pembantu presiden.

Selain itu, presiden akan menampung perbedaan pendapat, namun hanya terjadi dalam rapat terbatas ataupun sidang kabinet. Ketika sudah menjadi keputusan dalam rapat terbatas atau sidang kabinet, maka menteri harus melaksanakannya karena sudah dibuka ruang untuk diskusi oleh presiden. Demikian halnya diungkapkan Johan Budi, Juru Bicara Presiden Jokowi, bahwa presiden masih memantau perkembangan terkait menterinya yang terlibat kegaduhan dan yang meneruskan polemik tersebut di ranah publik dalam beberapa hari ini. Jika polemik masih diteruskan, maka presiden akan mengambil sikap tegas.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki harmonisasi Kabinet dalam rangka menyelesaikan masalah silang pendapat antarmenteri Kabinet Kerja yang sedang terjadi adalah *pertama*, berdasarkan usulan dari mantan Deputy Bidang Politik Wapres, Djohermansyah Djohan, yaitu perlu dibuatnya 'aturan main' para menteri khusus persoalan etika. *Code of Conduct* untuk anggota kabinet diperlukan agar para menteri mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini nantinya perlu dilengkapi dengan sanksi, bisa sanksi yang dimulai dari tingkat ringan yaitu mendapatkan teguran, sampai sanksi yang berat yaitu diganti. Kode etik ini juga harus berisi persoalan apa yang boleh disampaikan ke publik setelah rapat. Dengan adanya pengaturan ini, ke depannya kabinet bisa lebih bersatu secara visi dengan presiden di

depan publik. Hal-hal yang bersifat *confidential* tidak boleh disampaikan ke ranah publik. Kalau ada keputusan yang belum final sebelum ada pendapat dari sidang kabinet, maka tidak boleh ada menteri-menteri yang saling 'menyerang' pendapat atau pandangan kebijakan politik masing-masing.

Kalau tidak ada kode etik menteri, potensi untuk saling menyerang dalam hal perbedaan pendapat antarmenteri akan rawan terjadi. Para menteri dari kalangan profesional yang bersilang pendapat bisa terjadi karena ada kepercayaan diri yang tinggi dengan pengetahuan yang dimiliki masing-masing. Apalagi, mereka terbiasa menyampaikan pendapat-pendapatnya dengan lugas. Hal tersebut sah-sah saja selama mereka melakukan adu argumentasinya dalam sidang kabinet, bukan dalam forum publik.

Dari sisi aspek manajerial, para menteri sudah diatur tentang apa yang menjadi tugasnya. UU Kementerian pun sudah ada sehingga pola hubungan antarkementerian dan posisinya terhadap presiden seharusnya sudah diketahui oleh semua menteri. Namun, melihat bahwa sengketa pendapat akhir-akhir ini sering dan masih terjadi, usulan adanya *Code of Conduct* bagi para menteri menjadi pilihan solusi yang sangat berguna.

Hal *kedua* yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pendapat dalam kabinet adalah melakukan perencanaan terhadap apa yang akan dikerjakan, dalam arti, program-program kabinet harus dilakukan dengan integritas tanpa memikirkan kepentingan golongan atau partai. Hal ini tentu harus menjadi komunikasi politik yang intens antara presiden dengan para menterinya. *Ketiga*, presiden perlu mengingatkan kepada para menterinya agar jangan sampai mau didikte oleh pihak manapun. Dan yang *keempat*, presiden juga harus mengarahkan para menterinya agar mereka memperkuat koordinasi satu dengan yang lainnya. Dengan kabinet yang kompak, maka semua program bisa dengan mudah dieksekusi.

Dilihat dari perspektif kepemimpinan politik presiden yang berlandaskan konsep kepemimpinan nasional, presiden harus lebih meningkatkan nilai-nilai transparansi dalam berkomunikasi dan mengedepankan semangat *team work* dalam kabinet. Presiden perlu memberi rasa aman kepada bawahan untuk menyampaikan pandangan yang tampaknya kurang maksimal terjadi dalam hubungan antara presiden dengan para menterinya.

Dalam kasus silang pendapat antarmenteri dalam sebuah kabinet, hendaknya jangan sampai timbul kesan di mata masyarakat bahwa seorang

presiden itu berada 'di luar arena' persetujuan beberapa menternya. Jadi, faktor kepemimpinan politik nasional presiden yang harus diperkuat dalam kasus ini adalah faktor kemampuan menjalankan komunikasi politik yang baik dan efektif, serta faktor mempraktekkan semangat *team work* dalam tubuh kabinet. Hal inilah yang sebaiknya Presiden Jokowi tingkatkan agar konflik antarmenteri ini segera terselesaikan.

Dalam hal ini, presiden dapat menjadi penentu. Kalau kapasitas kepemimpinan seorang presiden mantap, beliau akan mampu mengelola perubahan menuju visinya. Tetapi kalau kepemimpinannya masih ada unsur yang belum optimal, maka wibawa presiden di mata para menternya juga tidak akan maksimal. Presiden perlu menunjukkan ketegasannya, terkait dengan posisi seorang presiden yang membawahi para menteri, sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi. Dengan demikian, kepemimpinan politik presiden diuji terkait bagaimana beliau mampu menjadi integrator dan dinamisator yang produktif sehingga politik menjadi kondusif.

Dengan berpegang pada prinsip di atas, dalam konteks tertentu presiden sebaiknya jangan terlalu memberi ruang yang longgar kepada para pembantunya sehingga para menteri memilih ruang yang terlalu lebar untuk berinisiatif. Presiden perlu *me-review* kembali sistem koordinasi kepada para pembantunya. Selain problem komunikasi antar menteri, ada beberapa problem yang penting diselesaikan segera, baik di level tingkat Menko-nya maupun di level presiden dan wakil presiden.

Penutup

Adapun silang pendapat antarmenteri Kabinet Kerja membutuhkan tindakan cepat dari presiden, yaitu komunikasi politik yang efektif. Presiden perlu mengedepankan prinsip efektivitas *team work* dalam manajerial kabinetnya. Posisi presiden sebagai atasan para menteri haruslah diimplementasikan secara tegas.

Ke depan, diperlukan suatu *Code of Conduct* bagi kabinet agar para menteri diberikan koridor yang jelas dan tegas terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu proses mengeluarkan suatu kebijakan politik. Kode etik yang jelas dan tegas juga akan menjamin bahwa perbedaan pandangan terkait suatu kebijakan publik akan dapat diselesaikan secara internal antarmenteri bersama presiden, dan tidak dilakukan dalam ranah publik

yang mana akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang kelancaran pemerintahan. Rencana kerja kabinet juga harus disusun secara lebih matang sehingga kebijakan-kebijakan politik yang saling terkait akan lebih mudah dieksekusi.

Dalam menyikapi silang pendapat antarmenteri yang terjadi di Kabinet Kerja, hendaknya DPR ikut mendorong atau memberi saran kepada presiden agar segera berkomunikasi secara tuntas dengan para menternya, terutama yang sedang berbeda pendapat. DPR harus mengingatkan Presiden Jokowi bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, para menteri adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa suatu koordinasi dan 'restu' dari presiden.

DPR juga perlu mengingatkan agar perbedaan pendapat yang terjadi antarmenteri Kabinet Kerja hendaknya tidak terlalu diekspos dalam ranah publik, karena itu akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat bahwa Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak kompak. Selain itu, hal ini dikhawatirkan dapat menghambat jalannya pemerintahan yang pada akhirnya akan menyebabkan kebijakan-kebijakan politik bagi kesejahteraan masyarakat akan terganggu pelaksanaannya.

Referensi

- "Cegah Kegaduhan Jokowi disarankan bikin Kode Etik untuk Menteri", <https://news.detik.com/berita/3158061/>, diakses 9 Maret 2016.
- "Enam Sengketa Kabinet Kerja yang Bikin Jokowi Marah", <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/05/>, diakses 2 Maret 2016.
- "Jejak Kegaduhan Menteri Rizal Ramli di Kabinet Jokowi", <http://news.detik.com/berita/3156619/>, diakses 2 Maret 2016.
- Kartini Kartono. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Raja Grafindo, Jakarta.
- "Menteri Kabinet Kerja Gaduh, Ketegasan Jokowi dipertanyakan", <http://nasional.sindonews.com/read/1090813/12/>, diakses 1 Maret 2016.
- "Menteri Kabinet Kerja terlibat Cekcok Melebar Hingga ke Media Massa", <http://www.jurnalasia.com/2016/03/03/>, diakses 2 Maret 2016.
- SHM Lerrick. 2010. *Implementasi Kepemimpinan Pada Tingkat Strategik*, Modul II: Kepemimpinan Nasional, Lemhannas.
- Upaya Menciptakan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, <https://www.academia.edu/7104166/>, diakses 8 Maret 2016
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.